

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Membangun :
ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
& WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555, Fax (0711) 313555

email : pn Palembang@gmail.com, website : www.pn-palembang.go.id

PALEMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Palembang



Pengadilan Negeri Palembang
JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
PALEMBANG - Sumatera Selatan 30129
e-mail : pnpalembang@gmail.com



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3.5 TELP.(0711) 311666. 352900 FAX.(0711) 311666
website : www.pt-palembang.go.id, email : ptplgkepegawaian@gmail.com
PALEMBANG 30126


PAKTA INTEGRITAS

Saya, **BONGBONGAN SILABAN, SH, L.L.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Palembang, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :


1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (*due professional care*);
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang


Dr. H. KRESNA MENON, SH., M. Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Palembang, 06 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan


BONGBONGAN SILABAN, SH., L.L.M.
NIP. 19681225 199212 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

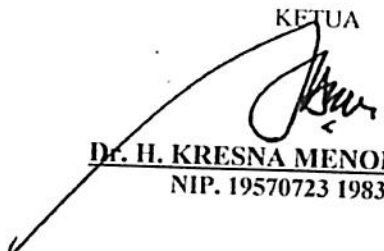
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KETUA


Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

PALEMBANG, 06 JANUARI 2021
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KETUA

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.
NIP. 196812251992121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Palembang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	100
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	75
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	75
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	75
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	75
9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70
10.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
17.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	NA
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	NA
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	17.777.831.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	504.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	590.635.000

PALEMBANG, Januari 2020

Ketua,


BONGBONGAN SILABAN, SH.LLM.
 NIP. 196812251992121001